

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pembandingan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya dan menjadi titik rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk menghindari bahwa penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam tinjauan literatur ini, penulis memasukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Nikodimus (2018)	Strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Teori komunikasi sosial (Astrid, 2009), teori perencanaan komunikasi (Cangara, 2013), dan teori komunikasi kelompok (Soekanto, 2002).	Kualitatif	Strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Nanga Bayan masih menghadapi berbagai kelemahan. Meskipun telah dilakukan musyawarah, koordinasi dengan tokoh masyarakat, dan pendekatan persuasif, partisipasi masyarakat belum

					maksimal karena kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi. Kepala desa sudah berupaya melibatkan masyarakat melalui musrenbang dan rapat-rapat, namun belum semua lapisan masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses pembangunan desa secara menyeluruh.
2.	Riau Simamora (2021)	Partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di desa lobutua kecamatan lintongnihuta kabupaten humbang hasundutan.	Teori Partisipasi Masyarakat dari Cohen dan Uphoff (1977).	Kualitatif	partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lobutua, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, masih belum mencapai tingkat aktifitas yang optimal dalam aspek perencanaan,

					pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil.
3.	Rahmat Sutan Siregar (2023)	Strategi komunikasi kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di kecamatan barumun kabupaten padang lawas.	Konsep Strategi Komunikasi Praktis dan Partisipasi Masyarakat (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi)	Kualitatif	Strategi komunikasi Kepala Desa menerapkan pemahaman yang baik tentang khalayak, penyusunan pesan yang jelas, pemilihan metode komunikasi yang tepat, dan pemanfaatan media yang sesuai. dan Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan dalam perencanaan, kesadaran tentang manfaat, penguatan keterampilan dan keterbukaan kepala desa. sedangkan

					faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya informasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, perbedaan pendapat dan konflik.
--	--	--	--	--	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Perbedaan dan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikodimus. adalah Penelitian Nikodimus (2018) dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan strategi komunikasi kepala Desa dan menggunakan metode penelitian yang sama. perbedaannya yaitu terletak pada penelitian Nikodimus membahas strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Sedangkan penelitian sekarang membahas strategi komunikasi partisipatif masyarakat desa tanjung menang kabupaten bengkulu selatan dalam pengelolaan dana desa.
2. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Riau Simamora adalah: Penelitian Riau Simamora (2021) dengan penelitian sekarang Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa dan Metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada penelitian sekarang membahas strategi komunikasi Kepala Desa dengan menggunakan Teori yang ada dalam bidang komunikasi pembangunan desa, sedangkan

penelitian sekarang membahas strategi komunikasi partisipatif masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

3. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Rahmat Sutan Siregar adalah: Penelitian Rahmat Sutan Siregar (2023) dengan penelitian sekarang Strategi Komunikasi Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana dan Metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada penelitian yang sekarang melihat strategi komunikasi Kepala Desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi penelitiannya.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.2.1 Komunikasi

2.2.1.1 Definisi Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung makna, yang dilakukan oleh penyampaian pesan (*source, communicator, atau audience*) dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama (Tasmin et al., 2020).

(Setiawan, 2023) mengemukakan komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate).

(Ahmad Sultra Rustan, 2017) Mengemukakan komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirim pesan-pesan sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.

2.2.1.2 Proses Komunikasi

Proses komunikasi adalah unsur penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan

dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Berdasarkan paradigma Lasweel, proses komunikasi dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder (Pahrudin, 2020).

1. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampain pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media partner dalam proses komunikasi pesan verbal (bahasa) dan pesan nonverbal (gesture, isyarat, gambar, warna, dan sebagainya) yang secara langsung mampu menerjemakan pikiran dan perasaan komunikator pada komunikan.

2. Proses komunikasi secara sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampain pesan oleh komunikator pada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambing sebagai media pertama.

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam meyampaikan komunikasi karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relative jauh atau jumlah yang banyak. Surat, telpon, surat kabar, majalah, radio, televisi, filim dan sebagainya adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder menggunakan media yang dapat diklarifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya) dan media nirmassa.

Sedangkan menurut (Tasmin et al., 2020) ada beberapa proses dalam komunikasi yaitu:

1. Proses komunikasi tatap muka

Proses Komunikasi tatap muka terjadi secara langsung dimana komunikator dan komunikasi saling berhadapan sambil saling melihat. Dalam situasi komunikasi seperti ini komunikator dapat melihat dan mengkaji dari si komunikan secara langsung, karena itu komunikasi tatap muka disebut juga komunikasi langsung.

2. Proses komunikasi melalui media

Proses Komunikasi melalui media adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikasi yang jauh tempatnya, dan atau banyak jumlah. Komunikasi bermedia disebut juga komunikasi tidak langsung (indirect communication) oleh karena itu dalam melancarkan komunikasi dengan menggunakan media, komunikator harus matang dalam perencanaan dan persiapannya sehingga ia merasa pasti bahwa komunikainya itu akan berhasil.

2.2.1.3 Unsur-unsur Komunikasi

Unsur-unsur komunikasi merupakan hal mendasar bagi berlangsungnya komunikasi yang ada di masyarakat. Berdasarkan definisi lasweel ini dapat diturunkan berdasarkan 5 unsur komunikasi yang saling ketergantungan satu sama lainnya, yaitu (Iriyanti, 2023) :

1. Komunikator (*source*), sumber merupakan pihak yang memiliki inisiatif atau kubutuhan dalam komunikasi. Sumbernya dapat berasal dari individua tau kelompok.
2. Pesan (*message*), pesan merupakan informasi yang oleh

sumber kepada penerima.

3. Saluran (*channel*), adalah media yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada komunikan.
4. Komunikan (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator.
5. Umpan Balik (*effect*), adalah tanggapan pesan dari penerima atas isi pesan yang disampaikan oleh komunikator.

2.2.1.4 Karakteristik Komunikasi

Berdasarkan pengertian komunikasi penulis bisa memahami bahwa adanya beberapa karakteristik komunikasi. Menurut (Riswandi, 2009) dalam buku yang berjudul Ilmu Komunikasi karakteristik komunikasi antara lain :

1. Komunikasi adalah suatu proses, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berulang kali.

4. Komunikasi adalah upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan yang dilakukan dalam keadaan sadar.
5. Komunikasi menuntut adanya partisipatif dan kerja sama dari pelaku yang terlibat. Aktivitas komunikasi akan berlangsung dengan baik, apabila pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi.
6. Komunikasi bersifat simbolis, komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol yang mempunyai makna.
7. Komunikasi bersifat transaksional, komunikasi pada dasarnya menuntut 2 tindakan memberikan dan menerima.
8. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu, yang Dimana mempunyai maksud bahwa para peserta atau pelaku yang

terlibat dalam komunikasi tidak hadir pada waktu serta tempat yang sama

2.2.1.5 Pola Komunikasi

Dari proses komunikasi, akan timbul pola, model, bentuk atau juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Di sini akan diuraikan proses komunikasi yang sudah masuk dalam kategori pola komunikasi yaitu: pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular.

1. Pola komunikasi primer

Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol suatu media atau saluran.

2. Pola komunikasi sekunder

Pola komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai simbol pada media pertama.

3 .Pola komunikasi linear

Pola ini mengandung makna lurus, pola komunikasi yang berjalan lurus. Proses penyampaian pesan baik menggunakan media maupun tanpa media dan tanpa adanya umpan balik.

4.Polakomunikasi sirkular

Sirkular dalam hal ini mengandung makna bundar, lingkaran, atau keliling. Dalam pola komunikasi sirkular, proses komunikasi berjalan secara terus menerus, sehingga umpan balik antara komunikator dan komunikan.

2.2.1.6 Bentuk Pola Komunikasi

Joseph A. devito membagi pola komunikasi menjadi empat, yakni komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antarpribadi , komunikasi kelompok dan komunikasi massa.

A. Komunikasi dengan diri sendiri

Ada tanda tanda umum sesuatu bisa dikatakan komunikasi dengan diri sendiri, yaitu :

- 1). Keputusan merupakan hasil pemikiran dan hasil usaha intelektual.
- 2). Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif.
- 3). Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan.

B. Komunikasi antarpribadi

Menurut sifatnya, komunikasi anatar personal dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi diadik (dyadic communication) dan komunikasi kelompok kecil (small group communication). Komunikasi diadik adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka melalui bentuk percakapan, dan dialog. Adapun komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka hal mana anggota anggotannya berinteraksi satu sama lain. Mengenai batas jumlah anggota tidak secara langsung disebutkan. Ada yang mengatakan biasanya antara 2-3 orang.

C. Komunikasi kelompok

Dalam komunikasi kelompok kita mengenal seminar, diskusi panel, pidato, rapat akbar, pentas seni tradisional di desa, pengarahan dan ceramah dengan kelompok besar. Dengan kata lain komunikasi sosial antara tempat, situasi dan sasarannya jelas. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan disuatu tempat dan

dengan banyak orang atau kelompok yang besar dan dengan tujuan yang jelas.

D. Komunikasi massa

Secara ringkas komunikasi massa bisa diartikan sebagai komunikasi dengan menggunakan media massa, tentunya media massa ini adalah media massa modern. Oleh karena itu media tradisional tidak dimasukan dalam istilah ini.¹⁸ Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukang dengan media sosial, dengan menyampaikan informasi dengan orang banyak dengan media massa, sepeti tv, radio dan sebagainya. [

2.2.1.7 Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi adalah perencanaan dan pelaksanaan komunikasi yang bertujuan menyampaikan pesan secara efektif kepada khalayak. Menurut Effendy (2003), strategi komunikasi mencakup isi pesan, metode penyampaian, dan media yang digunakan agar tujuan komunikasi tercapai.

Dalam konteks pembangunan desa, strategi komunikasi digunakan oleh pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Cangara (2013) membagi strategi komunikasi menjadi dua bagian, yaitu perencanaan (penetapan tujuan, pesan, media, dan waktu) serta pelaksanaan komunikasi (penyampaian pesan melalui berbagai saluran komunikasi seperti musyawarah desa, media sosial, atau media cetak).

Strategi komunikasi yang efektif bersifat partisipatif, artinya melibatkan masyarakat secara aktif. Rogers dan Shoemaker (1971) menyatakan bahwa strategi partisipatif ditandai oleh komunikasi dua arah, keterbukaan informasi, dan kesetaraan peran antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, menurut DeVito (2011), strategi komunikasi yang baik mengandung lima prinsip komunikasi antarpribadi, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Kelima prinsip ini membantu menciptakan komunikasi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

2.2.2 Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah Desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut H.A.W.Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “ Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan sedangkan menurut Haryanto (2007:2) desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas, dalam hal ini desa memiliki wewenang yaitu (a) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul, (b) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, (c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, (d) urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.2.3 Kepala Desa

2.2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 masa jabatan kepala desa selama 8 tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasnyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa adalah alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan badan permusyawaratan desa. Perangkat desa adalah unsur yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2.3.2 Wewenang Kepala Desa

Untuk menjalankan pemerintahan desa, kepala desa memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugasnya. Adapun dasar hukum pemerintah desa adalah berdasarkan (PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa) ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

desa. Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan Masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan per UU.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan per UU.

2.2.4 Partisipatif Masyarakat

Istilah "partisipatif" sering dikaitkan dengan tindakan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan pemerintah. Konsep partisipatif memiliki makna yang sangat penting dalam kegiatan Pembangunan.

Partisipatif merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dalam lingkungan kelompok, yang mendorong mereka untuk mendukung pencapaian tujuan kelompok serta mengambil tanggung jawab. Partisipatif bertujuan untuk mencapai keputusan yang diharapkan oleh masyarakat (Siregar, 2023).

Keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam keseluruhan rangkaian pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan harus melibatkan setiap tahapan dari awal hingga akhir. Karenanya, keterlibatan masyarakat dapat terwujud dalam empat tingkat:

1. Keterlibatan dalam tahap pengambilan keputusan.
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan.
3. Keterlibatan dalam pemanfaatan hasil.
4. Keterlibatan dalam menindaklanjuti.

Penelitian terdahulu mengungkapkan partisipatif merupakan suatu langkah aktif yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mengambil inisiatif dengan menggunakan cara pandang dan penalaran mereka sendiri-sendiri. Hal ini dilakukan melalui musyawarah dan proses tertentu (melalui lembaga dan mekanisme) yang memungkinkan mereka untuk mengontrol situasi dengan efektif (Putri & Nasdian, 2021).

Keterlibatan warga merupakan faktor yang mempengaruhi kesuksesan program pembangunan dan kemajuan di wilayah pedesaan. Diperlukan analisis mengenai bagaimana warga terlibat dalam usaha pemberdayaan serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan dan partisipatif mereka, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berlanjut dengan baik. Keterlibatan warga tidak sekadar melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk setiap program pembangunan, tetapi juga melibatkan mereka dalam menentukan masalah dan peluang yang ada di lingkungan mereka. Tanpa keterlibatan warga, setiap usaha pembangunan tidak akan berhasil. Terlepas dari bentuknya, tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan, dengan cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan serta kegiatan-kegiatan yang mengikuti. Partisipatif warga dalam konteks politik yang kurang aktif, salah satu

faktornya dapat disebabkan oleh popularitas rendah dari pelaku politik dalam masyarakat. Secara sederhana, popularitas ini berasal dari istilah "*electability*" yang mengindikasikan tingkat keterpilihan (Siregar, 2023).

Secara sederhana partisipatif dapat dijelaskan sebagai keterlibatan individu, kelompok, atau masyarakat dalam rangkaian program pengelolaan dana desa. Pernyataan ini menyiratkan bahwa individu, kelompok, atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi atau dukungan yang bermanfaat dalam mendukung kelancaran program pengelolaan dana desa melalui berbagai bentuk atau jenis partisipatif. Menurut pandangan yang dinyatakan oleh Hamijoyo dan Iskandar, bentuk-bentuk partisipasi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Partisipatif buah pikiran

Keterlibatan ide, yang diberikan oleh peserta dalam forum, pertemuan, atau rapat.

2. Partisipatif tenaga

Keterlibatan tenaga yang diberikan oleh peserta dalam beragam kegiatan untuk memajukan atau membangun desa, memberikan bantuan kepada sesama, dan sejenisnya.

3. Partisipatif harta benda

Keterlibatan aset yang disumbangkan oleh individu dalam berbagai aktivitas guna kemajuan atau pembangunan desa, memberikan bantuan kepada sesama, dan sejenisnya.

4. Partisipatif keterampilan dan kemahiran

Keterlibatan keterampilan dan keahlian yang diberikan oleh individu untuk mendorong berbagai bentuk usaha dan industri.

5. Partisipatif sosial

Keterlibatan sosial yang ditunjukkan oleh individu sebagai tanda solidaritas, contohnya berpartisipasi dalam arisan, koperasi, upacara berkabung, perayaan pernikahan, gotong royong, dan pertemuan bersama.

Menurut Angel dalam (Siregar, 2023) pertumbuhan partisipatif dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa masalah yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Partisipatif dapat diartikan sebagai keterlibatan sepenuhnya masyarakat dalam mendukung upaya pengelolaan dana desa yang telah diatur dan disetujui oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat cenderung mengambil sikap pasif dan berperan sebagai bawahan atau subordinate dari pemerintah.

2. Tahap Pelaksanaan

Rencana pembangunan yang dirancang dan disahkan oleh pemerintah dianggap sebagai keperluan masyarakat, sementara pembangunan yang didefinisikan atau disetujui oleh masyarakat dianggap sebagai aspirasi masyarakat yang mendapat sedikit prioritas.

2.2.5 Pengawasan masyarakat

Pengawasan merupakan upaya penetapan standar kinerja dalam mendesain sistem umpan balik, melakukan perbandingan kinerja dengan standar yang ada, mendeteksi penyimpangan, dan melakukan perbaikan secara efektif dan efisien (Anggraeni & Yuliani, 2019). Proses pengawasan dilakukan terhadap suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan agar kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kesalahan yang telah terjadi dapat diperbaiki dan tidak terulang di kemudian hari (Lolowang et al., 2018). Pengawasan masyarakat memiliki indikator yaitu pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengawasan batasan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, pengawasan hasil kerja dan pengawasan umpan balik serta perbaikan (Lolowang et al., 2018).

2.2.6 Dana Desa

Dana Desa mulai dianggarkan pertama kali dalam APBN pada tahun 2015 berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Khoirunnurrofik et al., 2021; Permatasari et al., 2021). Undang undang tersebut memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, serta kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat pihak yang mengawal proses penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, yaitu Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementrian Keuangan, Kementrian Salam Negeri, dan pemerintahan daerah (Aziz,2016)

Melalui dana desa, desa berkesempatan untuk meningkatkan pelayanan dasar baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dengan memaksimalkan potensinya (Hartojo et al., 2022). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pemerataan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ernawati et al., 2021;Pandiangan et al., 2021; Ramly et al., 2017). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dana desa difokuskan penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Aziz (2016) mengemukakan bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. Tingkat penyerapan dana desa yang sesuai dengan prioritas menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi telah rutin menerbitkan peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang selaras dengan prioritas nasional.

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah untuk Desa sebagai stimulant, melalui dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Sumber).

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di perdesaaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan di desa dapat menjadi nyata. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di perdesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai Tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di perdesaan (Rachmawati, 2021).

Menurut Hanif Nurcholis ((Siregar, 2023) Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi

dana desa direncanakan, dilaksanakan dan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Kebijakan alokasi dana desa (ADD) merupakan kebijakan yang menggunakan perpaduan antara pendekatan top-down dan bottom-up. Kedua pendekatan ini terefleksi pada proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh dua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat. Di tingkat pusat dirumuskan kebijakan yang bersifat normatif disertai dengan batasan-batasan administrative tersebut dengan aspirasi dan kreativitas masyarakat selaras dengan kasus maupun potensi yang dimiliki. Proses interaksi ini berlangsung dalam musyawara perancangan pembangunan.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana ALokasi Dana Desa (ADD) Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Tujuan disalurkan dana desa yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi maju, mandiri dan demokratis. Adanya dana Desa, dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

2.2.7. Teori Komunikasi Joseph A Devito

Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan yang disampaikan oleh seseorang dan diterima oleh orang lain atau

sekelompok orang, dengan berbagai respon dan dengan peluang untuk memberikan *feedback* (DeVito, 2011).

Menurut (DeVito, 2011) ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu:

a. Keterbukaan (*Openness*)

Kemauan memberikan tanggapan atas informasi yang diterima dalam berkomunikasi. Kualitas keterbukaan mengacu pada tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Kedua, komunikator bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang diterima. Ketiga, komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan ia bertanggung jawab atasnya.

b. Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan apa yang sedang dialami orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut.

c. Dukungan (*Supportiveness*)

Hubungan interpersonal yang efektif adalah dimana individu memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategik.

d. Rasa Positif (*Positiveness*)

Seseorang harus memiliki pandangan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif demi interaksi yang efektif.

e. Kestaraan (*Equality*)

Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara, dengan adanya pengakuan secara tersirat bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk diberikan. (Novianti, 2017).

Efektifitas menjadi penting untuk membantu individu yang terlibat dalam mencapai tujuannya, dalam penelitian ini ialah seorang pengguna yang ingin melakukan perjalanan antar kota (dalam durasi beberapa jam) dengan orang asing tidak hanya ditentukan oleh cara ia berkomunikasi sehari-hari tetapi juga cara ia bertindak sesuai dengan budaya menebeng.

Adapun fungsi lain dari komunikasi antarpribadi menurut (Cangara, 2012) yaitu:

- a. Mengetahui diri sendiri dan orang lain.
- b. Komunikasi antarpribadi memungkinkan kita untuk mengetahui lingkungan kita secara baik.
- c. Menciptakan dan memelihara hubungan baik antar personal.
- d. Mengubah sikap dan perilaku.
- e. Bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi.
- f. Membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan fungsi dari komunikasi antarpribadi, fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui diri sendiri dan orang lain, memungkinkan untuk mengetahui lingkungan secara baik, menciptakan dan memelihara hubungan baik antar personal dan bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi.

(Pearson, 2011) menyebutkan enam karakteristik komunikasi antarpribadi yaitu:

1. Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri pribadi (self).
Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan
Oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita.
2. Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional. Anggapan ini mengacu pada tindakan pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak menyampaikan dan menerima pesan.
3. Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antarpribadi. Artinya, komunikasi antarpribadi tidak

hanya berkenaan dengan isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga melibatkan siapa partner komunikasi kita dan bagaimana hubungan kita dengan partner tersebut.

4. Komunikasi antarpribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi.
 5. Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya dalam proses komunikasi.
 6. Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah maupun diulang.
- Menurut (DeVito, 2011)terdapat beberapa prinsip dalam komunikasi interpersonal yang terdiri dari:

Komunikasi interpersonal adalah proses transaksional karena terdapat banyak proses yang berlangsung didalamnya serta terdapat pula elemen yang saling bergantung. Dalam komunikasi interpersonal, proses komunikasi selalu terjadi dan mengalami perubahan sehingga tidak dapat diprediksi.

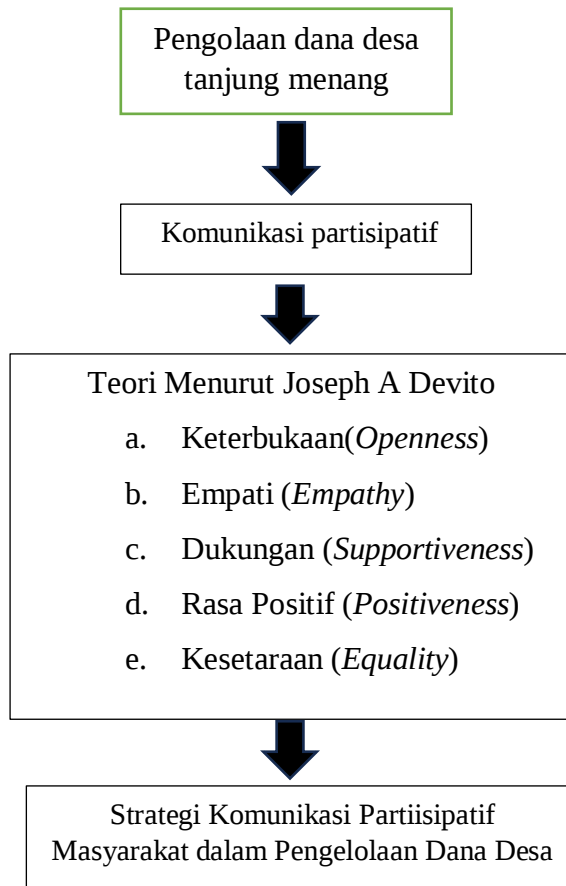
1. Komunikasi interpersonal memiliki satu tujuan atau beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam satu waktu.
2. Komunikasi interpersonal bersifat ambigu, karena setiap pesan yang disampaikan dapat dimaknai berbeda-beda oleh beberapa individu walupun pesan yang diberikan sama.
3. Komunikasi interpersonal digambarkan secara simetris dan dapat menjadi komplementer. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi terdapat hubungan yang simetris dapat mencerminkan perilaku masing-masing dan komplementer berarti antara satu individu dengan individu lainnya dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain.
4. Komunikasi interpersonal mengacu pada konten dan hubungan, karena di setiap penyampaian pesan oleh individu dapat dimaknai berbeda karena adanya dimensi hubungan yang berbeda atau dimensi konten yang berbeda.

5. Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses yang berkelanjutan, sehingga tidak memiliki awalan maupun akhir.

6. Komunikasi interpersonal tidak dapat dielakkan, dibalik, maupun diulang kembali. Untuk itu, komunikasi tidak dapat dihindari dalam situasi interaksi dan pesan yang disampaikan juga tidak dapat diulang kembali dengan cara yang sama.

Alasan peneliti menggunakan teori Komunikasi Antarpribadi ialah karena dalam melakukan perjalanan dengan orang asing yang berisiko, pengguna harus membangun rasa percaya dalam dirinya yang berasal dari berinteraksi dengan orang asing tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah peneliti

Kerangka berpikir adalah metode yang digunakan untuk merangkai dan menggambarkan berbagai konsep, ide, atau elemen yang terkait dengan suatu topik tertentu. Kerangka berpikir yang baik harus menerangkan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2016:60), kerangka berpikir adalah penjelasan tentative mengenai gejala-gejala yang menjadi permasalahan.

Penelitian ini tentang strategi komunikasi partisipatif pemerintah dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus desa tanjung menang kecamatan seginim kabupaten bengkulu Selatan). Teori yang digunakan adalah pola komunikasi sekunder dan pola komunikasi sirkular. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi

partisipatif pemerintah dalam upaya mewujudkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan alokasi dana desa.